

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya dengan melalui pendekatan studi kasus (*study case*), maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aparatur Kelurahan Wonorejo menjalankan peran sebagai pengelola dana publik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, aparatur menghimpun usulan masyarakat melalui musyawarah tingkat RT/RW, Musbangkel, dan Musrenbang, kemudian menentukan program berdasarkan urgensi kebutuhan, skala prioritas, ketentuan pemerintah, dan kemampuan anggaran. Pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, aparatur mengoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan, melengkapi dokumen pencairan dan pembayaran, dan menyampaikan laporan kepada pemerintah melalui sistem yang berlaku. Praktik tersebut menunjukkan tanggung jawab aparatur dalam menjaga amanah publik dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat Kelurahan Wonorejo telah dilibatkan terutama pada tahap perencanaan melalui penyampaian aspirasi dan usulan kebutuhan wilayah. Masyarakat juga merasakan manfaat pelaksanaan program berupa perbaikan jalan, saluran air, penyediaan fasilitas lingkungan, serta kegiatan

pemberdayaan. Namun, keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan teknis, pengawasan proyek, dan pertanggungjawaban masih terbatas. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui jumlah anggaran dan program secara umum, sedangkan rincian penggunaan dana belum disampaikan secara memadai. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui mekanisme pengaduan ketika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah.

3. Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Wonorejo telah mencerminkan aktualisasi bela negara melalui pengelolaan anggaran yang diarahkan pada pembangunan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai bela negara diwujudkan melalui kepatuhan aparatur terhadap peraturan, tanggung jawab dalam mengelola dan melaporkan dana publik, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, serta pengutamaan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, bela negara dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan secara fisik, tetapi juga diwujudkan melalui pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
4. Pelaksanaan pengelolaan Dana Kelurahan didukung oleh mekanisme perencanaan yang sistematis, koordinasi antaraparatur, penentuan skala prioritas, penggunaan sistem elektronik, pengawasan lembaga pemerintah, serta manfaat program yang dirasakan masyarakat. Namun, pengelolaannya

masih menghadapi keterbatasan anggaran, perbedaan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme Dana Kelurahan, keterbukaan informasi yang belum terperinci, kendala teknis dari penyedia atau kontraktor, serta hambatan administratif dalam pelaksanaan beberapa program. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Kelurahan telah berjalan sesuai mekanisme, tetapi masih membutuhkan penguatan transparansi, pengawasan teknis, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan program.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoritis, praktis, maupun substantif :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya dalam memahami pengelolaan dana kelurahan melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik tidak hanya dapat dianalisis melalui angka, laporan, dan prosedur administratif, tetapi juga melalui praktik pengelolaan, keterlibatan para aktor, serta kondisi kontekstual yang memengaruhi pelaksanaannya pada setiap tahapan program.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi aparaturnya Kelurahan Wonorejo, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah mengenai pentingnya penguatan tata kelola dana kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan perlu terus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat,

keterbukaan informasi, pengawasan program, serta komunikasi yang lebih jelas antara aparatur dan warga

3. Secara substantif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana kelurahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dana kelurahan akan lebih bermakna apabila dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan warga

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Informasi yang tersedia hanya bersifat umum dan disampaikan oleh aparatur kelurahan, sementara dokumen administratif dan laporan keuangan rinci tersimpan di sistem pemerintah kota. Kondisi ini membatasi kemampuan peneliti untuk memperoleh gambaran lengkap tentang detail pengeluaran dan praktik administrasi di lapangan.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk :

1. **Penelitian selanjutnya** dapat menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu mengombinasikan penelitian kualitatif dengan analisis kuantitatif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami makna dan pengalaman aparatur serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kelurahan,

tetapi juga untuk mengukur hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, efektivitas program, dan kepuasan masyarakat .

2. Aparatur Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

perlu meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyampaikan ringkasan anggaran dan realisasi program yang memuat nama kegiatan, lokasi, nilai anggaran, hasil pelaksanaan, serta pihak pelaksana. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui forum musyawarah, papan informasi, media sosial, atau media digital kelurahan agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.